

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chandra, T., Y, (2022). *Hukum Pidana*. Kota Jakarta. Penerbit PT. Sangir Multi Usaha.
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.
- Hartanti, E., (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Kota Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.
- Hartanto. (2019). *Memahami Hukum Pidana*. Kota Sleman Yogyakarta. Penerbit Lintang Pustaka Yogyakarta.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta. Mirra Buana Media.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Kota Mataram. Penerbit Mataram University Press.
- Marzuki P. M. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kota Jakarta. Penerbit Prenamedia Group.
- Mukhlis, tarmizi, & Ainal Hadi. (2018). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Kota Banda Aceh. Penerbit Syiah Kuala University Press.
- Nursya, N. A., & SH, M. (2020). *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Pada Tindak Pidana Korupsi*. Kota Jakarta, Penerbit CV Alungadan Mandiri,
- Ravizki, E. N., & SH, L. M. (2024). *Anti-Corruption Education: Building Integrity In Fighting Corruption*. Nas Media Pustaka.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Kota Depok. Penerbit Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Kota Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Solikin, N., (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Kota Pasuruan. Penerbit Qiara Media.
- Syauket, A., & Wijanarko, D. S. (2024). *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Kota Malang. Penerbit Litnus.
- Sumardi, L. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi*. Kota Lombok. Penerbit Pustaka Lombok.
- Santoso, A. P. A., dkk. (2022). *Tindak Pidana Korupsi*. Kota Bantul Yogyakarta. Penerbit Pustaka Baru Press.

Jurnal

- Al Faridzi, M., & Nachrawi, G. (2022). *Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid. Sus/2021)*. Jurnal Kewarganegaraan, 6 (2), 3014-3019.
- Amili, N. A. K., & Puluhulawa, I. (2025). *Obstruction of Justice Dalam Proses Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Kasus Kebocoran Dokumen di Kementerian ESDM*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5 (1), 838-849.

- Arfiani, A., Syofyan, S., & Delyarahmi, S. (2023). *Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction of Justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Unes Journal of Swara Justisia, 6 (4), 516-540.
- Damanik, F., Gea, F. M. D., & Rosmalinda, R. (2024). *Sejarah Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Journal Sains Student Research, 2(5), 287-298.
- Fahririn, F. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Turut Membantu Dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. SUPREMASI: Jurnal Hukum, 5(2), 202-211.
- Lubis, F., & Sinaga, J. P. (2023). *Analisis Obstruction of Justice dalam Perspektif Hukum Pidana*. c, 6 (2), 6591-6601.
- Mayrachelia, D. S., & Cahyaningtyas, I. (2022). *Karakteristik perbuatan advokat yang termasuk tindak pidana Obstruction of Justice berdasarkan ketentuan pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4 (1), 121-132.
- Pratiwi, S. (2022). *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Binamulia Hukum, 11(1), 69-80.
- Prasetiono, Y., Arifin, Z., & Sudarmanto, K. (2022). *Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal USM Law Review, 5(2), 647-662.
- Ramadhan, M. F. A., & Hutabarat, R. R. (2021). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Diduga Turut*

Melakukan (Medepleger) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor: 22/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst. Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 1329-1353.

Sadri, F., & Atmoko, D. (2023). *Konstruksi Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 46/Pid. Sus/2021/Pn. Srg Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online), 4(2), 815-833.*

Tjoneng, A., Basani, C. S., & Sidabutar, N. (2020). *Menguji Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberian Izin Penggeledahan Sebagai Tindakan Merintang Proses Penyidikan (Obstruction of Justice). Jurnal Esensi Hukum, 2(2), 48-63.*

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Lain-lain

Andini, O. G., Gusreyna, L. A., Erawaty, R., & Eriansyah, S. (2023).

Problematika Delik Obstruction of Justice dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Alauddin Law Development Journal, 5(3), 553-560.

Auriellia Putri, S. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku*

Penghalangan Proses Hukum (Obstruction of Justice) Dalam Tindak Pidana Korupsi (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur).

Erhartanti, R. (2016). *Tindak Pidana Turut Serta Dalam Melakukan*

Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Ditinjau Dari Fiqh Jinayah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 91/Pid. B/2014/Pn. Bkn) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Yoga, P. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana*

Obstruction of Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya).

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong*

Penguatan Pemberantasan Korupsi, <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan->

[pemberantasan-korupsi](#), di akses pada tanggal 12 Juni 2025 Pukul
18.30 WIB